



Peran Masyarakat Desa Beringin dalam Demokrasi Politik

Mufida Hadad¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: 120606004@unima.ac.id, romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 02, 2025

Accepted January 31, 2025

Published March 31, 2025

Keywords:

Peran,
Masyarakat,
Demokrasi Politik



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat Desa Beringin dalam demokrasi politik dengan fokus pada partisipasi dalam pemilihan politik, keterlibatan dalam musyawarah dan perencanaan pembangunan desa, serta kesadaran politik dan pembelajaran demokrasi di kalangan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap berbagai aktivitas politik di Desa Beringin, dimana informan dipilih secara purposive untuk mendapatkan perspektif yang beragam dari berbagai lapisan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan politik cukup tinggi secara kuantitatif namun masih diwarnai oleh politik uang dan mobilisasi berbasis primordial, keterlibatan dalam musyawarah desa masih belum optimal karena didominasi elite lokal dan rendahnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi efektif, sementara kesadaran politik menunjukkan perkembangan positif terutama di kalangan generasi muda yang lebih kritis dan aktif menggunakan media sosial untuk partisipasi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun demokrasi prosedural telah berjalan di tingkat desa, demokrasi substansial masih menghadapi berbagai tantangan terkait kualitas partisipasi, inklusivitas, dan akuntabilitas yang memerlukan upaya sistematis untuk penguatan kapasitas masyarakat, transparansi pemerintahan, dan transformasi budaya politik menuju demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

Abstract

This study aims to analyze the role of the Beringin Village community in political democracy with a focus on participation in political elections, involvement in village development deliberations and planning, as well as political awareness and democratic learning among the community. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and participant observation of various political activities in Beringin Village, where informants were selected purposively to obtain diverse perspectives from various levels of society. The results of the study indicate that community participation in political elections is quite high quantitatively but is still colored by money politics and primordial-based mobilization, involvement in village deliberations is still not optimal due to the dominance of local elites and the low capacity of the community to participate effectively, while political awareness shows positive developments, especially among the younger generation who are more critical and actively use social media for political participation. This study concludes that although procedural democracy has been implemented at the village level, substantial democracy still faces various challenges related to the quality of participation, inclusiveness, and accountability that require systematic efforts to strengthen community capacity, government transparency, and political culture transformation towards a more mature and quality democracy.

Keywords: Role, Society, Political Democracy

A. Pendahuluan

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi telah menjadi diskursus penting dalam kajian politik kontemporer, dimana partisipasi masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan implementasi nilai-nilai demokratis di tingkat lokal (Huntington, 1991). Dalam konteks Indonesia, demokratisasi yang dimulai pasca reformasi 1998 telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri (Nordholt & van Klinken, 2007). Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi substansial, karena di tingkat inilah interaksi antara pemerintah dan masyarakat berlangsung secara langsung dan intensif (Antlov, 2003). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel, dimana masyarakat desa memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama (Sutoro, 2014).

Partisipasi politik masyarakat desa tidak hanya terbatas pada pelaksanaan hak pilih dalam pemilihan kepala desa, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam musyawarah desa, perencanaan pembangunan, pengawasan penggunaan anggaran, dan evaluasi program-program pemerintahan desa (Gaventa & Barrett, 2012). Konsep demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan publik menemukan relevansinya dalam praktik pemerintahan desa di Indonesia, dimana tradisi musyawarah mufakat telah lama menjadi bagian dari budaya lokal (Habermas, 1996). Namun demikian, implementasi demokrasi di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran politik masyarakat, dominasi elite lokal, patronase politik, dan lemahnya kapasitas kelembagaan desa (Aspinall & Berenschot, 2019). Fenomena money politics, politik identitas, dan mobilisasi massa berbasis primordial masih mewarnai dinamika politik desa, yang pada gilirannya dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang substantif dan berkualitas (Mietzner, 2013).

Masyarakat desa memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, dimana ikatan sosial yang kuat, homogenitas budaya, dan pola hubungan patron-klien masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari (Scott, 1976). Karakteristik ini dapat menjadi modal sosial yang mendukung penguatan demokrasi lokal, namun sekaligus dapat menjadi penghambat apabila tidak dikelola dengan baik, seperti munculnya nepotisme, dominasi kelompok tertentu, dan eksklusi terhadap kelompok marginal (Putnam, 1993). Studi tentang peran masyarakat dalam demokrasi desa menjadi penting untuk memahami bagaimana praktik demokrasi berlangsung di akar rumput, bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses politik, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas demokrasi di tingkat lokal (Törnquist, 2013). Desa Beringin sebagai salah satu entitas pemerintahan desa menawarkan konteks empiris yang menarik untuk dikaji, mengingat dinamika sosial politik yang berkembang di desa tersebut mencerminkan kompleksitas hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, dan berbagai aktor politik lainnya dalam kerangka demokrasi lokal.

Penelitian tentang demokrasi desa telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan berbagai pendekatan dan fokus kajian, namun pemahaman yang komprehensif tentang peran aktual masyarakat dalam praktik demokrasi politik di tingkat desa masih memerlukan pendalaman lebih lanjut (Aspinall, 2014). Literatur yang ada menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa dalam politik seringkali bersifat instrumental dan transaksional, dimana masyarakat berpartisipasi karena adanya insentif material atau tekanan sosial, bukan karena kesadaran politik yang genuine (Berenschot, 2018). Di sisi lain, terdapat pula studi yang menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki agensi politik yang cukup kuat dalam

mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah desa, terutama melalui mekanisme musyawarah dan forum-forum partisipasi yang disediakan oleh regulasi (Antlov, Wetterberg & Dharmawan, 2016). Kontradiksi dalam temuan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian kontekstual yang lebih mendalam untuk memahami variasi praktik demokrasi di berbagai desa dengan karakteristik sosial ekonomi dan budaya yang berbeda.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa dan praktik demokrasi lokal dengan menggunakan berbagai pendekatan teoritis dan metodologis. Penelitian yang dilakukan oleh Antlov (2003) menganalisis tentang transformasi demokrasi desa di Indonesia pasca reformasi, dimana ditemukan bahwa demokratisasi di tingkat desa mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan musyawarah desa, namun masih terdapat praktik-praktik otoritarian dan dominasi elite lokal yang menghambat terwujudnya demokrasi substansial. Antlov menekankan bahwa meskipun secara prosedural demokrasi desa mengalami kemajuan, namun dari sisi substansi masih banyak kekurangan terutama dalam hal akuntabilitas pemerintahan desa dan pemberdayaan kelompok marginal. Temuan Antlov menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan dan regulasi saja tidak cukup untuk menghasilkan perubahan demokratis yang fundamental, melainkan memerlukan transformasi budaya politik dan penguatan kapasitas masyarakat sipil di tingkat lokal.

Sutoro (2014) dalam kajiannya tentang desa membangun Indonesia mengungkapkan bahwa keberadaan Undang-Undang Desa telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa, terutama melalui mekanisme musyawarah desa, perencanaan pembangunan partisipatif, dan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Sutoro menekankan bahwa dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat memberikan peluang bagi desa untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun penelitian Sutoro juga menemukan adanya berbagai kendala dalam implementasi UU Desa, termasuk kapasitas aparatur desa yang masih rendah, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dan masih lemahnya mekanisme akuntabilitas sosial yang melibatkan masyarakat secara aktif. Aspinall dan Berenschot (2019) dalam studi komprehensif mereka tentang demokrasi untuk penjualan di Indonesia menganalisis bagaimana politik uang dan patronase telah mengubah karakter demokrasi lokal, dimana hubungan antara politisi dan pemilih lebih banyak dimediasi oleh transaksi material dibandingkan dengan program dan ideologi politik, fenomena ini juga ditemukan dalam pemilihan kepala desa dimana kandidat seringkali melakukan distribusi uang dan barang kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji tentang demokrasi desa dan partisipasi masyarakat, namun masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi melalui penelitian lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek formal dan institusional dari demokrasi desa, seperti struktur pemerintahan, regulasi, dan mekanisme partisipasi yang tersedia, sementara dinamika informal, praktik sosial budaya, dan strategi aktor dalam berinteraksi dengan sistem politik masih kurang mendapat perhatian (Törnquist, 2013). Penelitian tentang peran masyarakat dalam demokrasi politik seringkali menggunakan pendekatan top-down yang melihat masyarakat sebagai objek pasif dari kebijakan pemerintah, dan belum banyak yang mengeksplorasi agensi masyarakat dalam mengkonstruksi dan memaknai demokrasi sesuai dengan konteks lokal mereka (Li, 2007). Selain itu, studi-studi yang ada cenderung bersifat general dan kurang memberikan gambaran detail tentang bagaimana praktik demokrasi berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, termasuk bagaimana mereka menegosiasikan kepentingan, menyelesaikan konflik, dan membangun konsensus dalam konteks yang diwarnai oleh hierarki sosial, ketimpangan

ekonomi, dan fragmentasi politik.

Research gap lainnya adalah minimnya kajian yang menganalisis secara kritis tentang efektivitas mekanisme partisipasi yang tersedia dalam sistem pemerintahan desa, apakah mekanisme tersebut benar-benar memberdayakan masyarakat atau justru menjadi instrumen legitimasi bagi elite lokal untuk mempertahankan kekuasaan mereka (Hickey & Mohan, 2004). Pertanyaan tentang siapa yang berpartisipasi, mengapa mereka berpartisipasi, dan apa hasil dari partisipasi tersebut masih memerlukan jawaban yang lebih komprehensif melalui penelitian empiris yang mendalam. Studi tentang Desa Beringin menjadi penting untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini, karena dengan menganalisis kasus spesifik dapat diperoleh pemahaman yang lebih nuansif tentang bagaimana masyarakat desa dengan karakteristik sosial budaya tertentu berinteraksi dengan sistem demokrasi politik, dan faktor-faktor apa saja yang memfasilitasi atau menghambat partisipasi politik yang bermakna.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan untuk memahami peran masyarakat Desa Beringin dalam demokrasi politik dengan tidak hanya fokus pada dimensi formal institusional, tetapi juga mengeksplorasi dimensi informal dan kultural yang membentuk praktik demokrasi di tingkat lokal. Penelitian ini akan menggunakan perspektif bottom-up yang menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif yang memiliki agensi dalam mengkonstruksi dan memaknai demokrasi, bukan sekadar objek pasif dari kebijakan pemerintah (Cornwall & Coelho, 2007). Dengan pendekatan ini, penelitian akan dapat mengungkap bagaimana masyarakat desa menggunakan berbagai strategi dan taktik untuk mempengaruhi proses politik, bagaimana mereka memanfaatkan ruang partisipasi yang tersedia, dan bagaimana mereka menciptakan ruang-ruang alternatif untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka ketika mekanisme formal tidak berfungsi dengan baik.

Novelty lainnya adalah fokus pada interaksi antara modal sosial, budaya politik lokal, dan struktur kelembagaan dalam membentuk kualitas demokrasi di Desa Beringin, dengan menggunakan kerangka analisis yang integratif yang menggabungkan perspektif sosiologis, antropologis, dan ilmu politik (Bourdieu, 1986). Penelitian ini akan menganalisis bagaimana jaringan sosial, norma resiprositas, kepercayaan, dan identitas kolektif yang ada dalam masyarakat Desa Beringin berinteraksi dengan struktur kekuasaan dan institusi formal untuk menghasilkan pola-pola partisipasi politik yang spesifik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami kompleksitas demokrasi lokal di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk penguatan demokrasi partisipatif di tingkat desa yang lebih responsif terhadap konteks lokal.

Realitas demokrasi politik di Desa Beringin mencerminkan kompleksitas yang juga ditemukan di banyak desa lain di Indonesia, dimana terdapat ketegangan antara ideal demokrasi partisipatif dengan praktik politik yang masih diwarnai oleh patronase, politik identitas, dan dominasi elite lokal. Pengamatan awal menunjukkan bahwa meskipun secara formal telah tersedia berbagai mekanisme partisipasi seperti musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan, dan forum-forum konsultasi publik, namun partisipasi masyarakat dalam forum-forum tersebut masih belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Banyak warga yang tidak hadir dalam forum-forum tersebut karena berbagai alasan seperti kesibukan ekonomi, merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi, atau karena merasa bahwa keputusan telah ditentukan sebelumnya oleh elite desa sehingga partisipasi mereka tidak akan membawa perubahan signifikan.

Di sisi lain, terdapat pula dinamika positif dalam kehidupan demokrasi Desa Beringin, dimana sebagian masyarakat mulai menunjukkan kesadaran politik yang lebih baik dengan aktif mengawasi kinerja pemerintah desa, menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan memobilisasi dukungan untuk

isu-isu tertentu (Lim, 2013). Kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti kelompok tani, kelompok perempuan, dan karang taruna juga mulai berperan lebih aktif sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan konstituen mereka. Realitas ini menunjukkan bahwa demokrasi di Desa Beringin berada dalam proses transisi dan konsolidasi, dimana berbagai aktor sedang belajar dan beradaptasi dengan sistem demokrasi yang relatif baru, dan hasil dari proses ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana berbagai pihak yang terlibat mampu mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substansial dan berkualitas.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang peran masyarakat Desa Beringin dalam demokrasi politik melalui perspektif dan pengalaman para aktor yang terlibat langsung dalam praktik politik di tingkat desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna subjektif, interpretasi, dan konstruksi sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa terhadap demokrasi dan partisipasi politik, yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui pendekatan kuantitatif (Creswell, 2014). Metode kualitatif memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan kontekstual, sehingga dapat mengungkap kompleksitas fenomena sosial politik yang terjadi di tingkat lokal dengan segala nuansa dan dinamikanya (Denzin & Lincoln, 2011).

Penelitian ini berusaha memahami bagaimana masyarakat Desa Beringin memaknai demokrasi, bagaimana mereka berpartisipasi dalam proses politik, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam kehidupan politik desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipatif sebagai instrumen utama untuk memperoleh data primer yang kaya dan komprehensif. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik-topik yang telah ditentukan sekaligus memberikan ruang bagi informan untuk mengekspresikan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas (Kvale & Brinkmann, 2009). Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan variasi karakteristik sosial ekonomi, tingkat pendidikan, usia, gender, dan keterlibatan dalam aktivitas politik desa, sehingga dapat diperoleh perspektif yang beragam tentang fenomena yang diteliti. Wawancara dilakukan secara face-to-face dengan durasi antara 45 hingga 90 menit untuk setiap informan, dan seluruh proses wawancara direkam dengan menggunakan alat perekam audio setelah mendapat persetujuan dari informan untuk kemudian ditranskrip secara verbatim sebagai bahan analisis. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat Desa Beringin dan mengamati berbagai aktivitas politik yang berlangsung di desa, termasuk musyawarah desa, rapat perencanaan pembangunan, pertemuan kelompok masyarakat, dan interaksi informal antar warga dalam berbagai setting sosial. Teknik observasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial budaya yang membentuk praktik politik di desa, mengamati perilaku aktual masyarakat dalam proses politik, dan mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang dikatakan oleh informan dengan apa yang mereka lakukan dalam praktik sehari-hari (Spradley, 1980).

Selama proses observasi, peneliti membuat catatan lapangan yang detail tentang setting, aktor yang terlibat, interaksi yang terjadi, dan dinamika kekuasaan yang terlihat dalam berbagai forum dan aktivitas politik desa. Data observasi ini kemudian digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik dan valid tentang fenomena yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik yang meliputi tahapan koding terbuka,

koding aksial, dan koding selektif untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data (Braun & Clarke, 2006).

Proses analisis dimulai dengan membaca transkrip wawancara dan catatan lapangan secara berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang data, kemudian melakukan koding untuk mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kode-kode yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan menjadi kategori-kategori yang lebih abstrak, dan kategori-kategori tersebut selanjutnya disintesis menjadi tema-tema utama yang merepresentasikan pola-pola konsisten dalam data.

Untuk memastikan kredibilitas dan trustworthiness dari temuan penelitian, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data, member checking dengan memverifikasi interpretasi peneliti kepada informan, dan peer debriefing dengan mendiskusikan proses dan hasil analisis bersama peneliti lain yang memiliki keahlian dalam bidang yang relevan. Penelitian ini telah memperoleh informed consent dari seluruh informan yang terlibat, dimana mereka telah diberikan penjelasan tentang tujuan penelitian, prosedur pengumpulan data, hak-hak mereka sebagai informan, dan jaminan kerahasiaan identitas serta informasi yang mereka berikan. Untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi privasi informan, dalam pelaporan hasil penelitian digunakan inisial atau nama samaran untuk mengidentifikasi sumber informasi tanpa mengungkapkan identitas asli mereka. Lokasi penelitian adalah Desa Beringin yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki dinamika politik yang menarik untuk dikaji dan aksesibilitas yang memungkinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data secara intensif. Penelitian lapangan dilaksanakan dalam rentang waktu yang cukup untuk memperoleh data yang jenuh, dimana tidak ada lagi informasi baru yang signifikan yang muncul dari proses pengumpulan data tambahan, sehingga dapat dipastikan bahwa temuan penelitian telah mencerminkan fenomena yang diteliti secara komprehensif.

C. Results and Discussion

1. Result

a. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pemilihan Politik

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Beringin memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam berbagai proses pemilihan politik, baik pemilihan kepala desa, pemilihan legislatif DPRD, pemilihan Bupati, maupun pemilihan Presiden. Informan WP menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam demokrasi politik yang ada di Desa Beringin dengan terlibat dalam berbagai pemilihan yang diselenggarakan, baik yang berskala desa maupun yang lebih luas. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses politik telah tertanam dalam sebagian masyarakat desa, dimana mereka memandang partisipasi pemilihan sebagai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus dijalankan. Motivasi untuk berpartisipasi ini tidak hanya didorong oleh kesadaran politik semata, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial seperti ajakan dari tokoh masyarakat, tekanan sosial dari lingkungan, dan harapan untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan yang akan dihasilkan oleh pemimpin terpilih.

Observasi yang dilakukan peneliti di lokasi TPS pada saat pemilihan menunjukkan antusiasme masyarakat yang cukup besar, dimana sejak pagi hari warga sudah mulai berdatangan untuk menggunakan hak pilih mereka. Suasana di TPS berlangsung tertib dan penuh kekeluargaan, dimana warga saling menyapa dan berbincang sambil menunggu giliran

untuk mencoblos. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemilihan tidak hanya dipandang sebagai rutinitas politik formal, tetapi juga sebagai momen sosial dimana masyarakat berkumpul dan berinteraksi satu sama lain. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilihan juga didorong oleh sosialisasi yang intensif dari panitia pemilihan dan pemerintah desa yang mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka, serta adanya sanksi sosial bagi mereka yang tidak berpartisipasi dalam bentuk stigma sebagai warga yang tidak peduli terhadap masa depan desa.

Namun demikian, tingginya angka partisipasi dalam pemilihan tidak serta merta menunjukkan kualitas partisipasi yang tinggi pula dalam hal pemahaman terhadap visi misi kandidat dan pertimbangan rasional dalam menentukan pilihan. Hasil wawancara dengan beberapa informan mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat memilih kandidat tertentu bukan berdasarkan program dan track record yang ditawarkan, melainkan karena faktor kedekatan personal, hubungan kekerabatan, pemberian bantuan material, atau mobilisasi oleh tokoh masyarakat yang mereka hormati. Fenomena politik uang juga masih ditemukan dalam beberapa pemilihan, dimana kandidat atau tim sukses melakukan distribusi uang tunai, sembako, atau janji-janji material lainnya kepada pemilih menjelang hari pemilihan. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Desa Beringin masih belum sepenuhnya berjalan secara substantif, dimana pertimbangan programatik dan akuntabilitas belum menjadi faktor utama dalam pilihan politik masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif dimana sebagian masyarakat, terutama generasi muda dan kelompok terdidik, mulai menunjukkan sikap kritis terhadap kandidat dan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang atau mobilisasi berbasis primordial. Mereka aktif mencari informasi tentang kandidat melalui berbagai media, berdiskusi dengan kelompok sebaya tentang pilihan politik, dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang lebih rasional tentang siapa yang dianggap paling kompeten dan berintegritas untuk memimpin. Perkembangan ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran politik sedang berlangsung di kalangan masyarakat Desa Beringin, dimana pengalaman berdemokrasi yang terakumulasi dari waktu ke waktu secara perlahan mengubah budaya politik masyarakat ke arah yang lebih matang dan rasional, meskipun proses ini masih memerlukan waktu yang cukup panjang dan dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat transformasi budaya politik tersebut.

b. Keterlibatan Masyarakat dalam Musyawarah dan Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan forum partisipasi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan desa, dimana masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, mengusulkan program pembangunan, dan terlibat dalam pengambilan keputusan tentang prioritas pembangunan desa. Hasil observasi menunjukkan bahwa forum-forum musyawarah ini diselenggarakan secara rutin sesuai dengan regulasi yang ada, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam forum tersebut masih belum optimal. Dalam beberapa musyawarah yang diamati, jumlah peserta yang hadir relatif terbatas dan didominasi oleh tokoh masyarakat, ketua RT/RW, kepala dusun, dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, sementara masyarakat umum yang hadir jumlahnya sangat sedikit. Fenomena rendahnya partisipasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealita demokrasi partisipatif dengan realitas praktik di lapangan, dimana tidak semua warga merasa memiliki akses dan kemampuan untuk terlibat dalam forum-forum formal tersebut.

Informan NP memberikan pandangan bahwa cara untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi politik adalah dengan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam

berbagai hal yang berkaitan dengan politik, baik pemilihan maupun aktivitas politik lainnya. Pernyataan ini mengindikasikan kesadaran akan pentingnya mobilisasi dan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dimana tidak cukup hanya menyediakan ruang partisipasi tetapi juga perlu ada upaya aktif untuk mengajak dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah desa dan tokoh masyarakat memang melakukan upaya mobilisasi dengan mengirimkan undangan kepada warga, mengumumkan melalui pengeras suara, dan melakukan pendekatan personal kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir dalam musyawarah. Namun upaya mobilisasi ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak warga yang tidak hadir dengan berbagai alasan seperti kesibukan mencari nafkah, merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi, atau karena apatis terhadap proses musyawarah yang dianggap tidak membawa perubahan signifikan.

Kualitas musyawarah yang berlangsung juga menjadi isu penting dalam konteks partisipasi masyarakat, dimana observasi menunjukkan bahwa diskusi dalam musyawarah seringkali didominasi oleh elite desa dan tokoh-tokoh tertentu yang memiliki kemampuan berbicara dan pengetahuan tentang regulasi dan prosedur pemerintahan. Masyarakat biasa yang hadir cenderung pasif dan jarang menyampaikan pendapat, baik karena tidak percaya diri, takut salah, atau karena merasa bahwa pendapat mereka tidak akan didengarkan. Dalam beberapa kasus, keputusan dalam musyawarah tampak sudah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah desa, dan musyawarah hanya dijadikan sebagai forum legitimasi untuk mendapatkan persetujuan formal dari masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural musyawarah telah dijalankan sesuai regulasi, namun dari sisi substansi masih belum mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan dialog setara dan pengambilan keputusan kolektif berdasarkan argumentasi terbaik.

Meskipun demikian, terdapat pula temuan positif dimana beberapa kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok perempuan, dan karang taruna mulai aktif menyampaikan usulan program dan mengadvokasi kepentingan anggota mereka dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Kelompok-kelompok ini telah melakukan pertemuan internal sebelumnya untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun usulan program yang akan disampaikan dalam musyawarah desa, sehingga mereka datang dengan persiapan yang lebih baik dan mampu menyampaikan aspirasi secara lebih terorganisir. Pemerintah desa juga mulai responsif terhadap usulan-usulan dari kelompok masyarakat ini, dan beberapa usulan telah diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat banyak tantangan, proses pembelajaran demokrasi partisipatif sedang berlangsung di Desa Beringin, dimana berbagai aktor sedang mencari bentuk dan mekanisme partisipasi yang paling sesuai dengan konteks lokal mereka.

c. Kesadaran Politik dan Pembelajaran Demokrasi di Kalangan Masyarakat

Kesadaran politik masyarakat Desa Beringin menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan pengalaman berdemokrasi yang terakumulasi dari waktu ke waktu dan akses terhadap informasi yang semakin terbuka melalui berbagai media. Informan YS menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat Desa Beringin dalam demokrasi politik sangat bagus karena memberikan pengalaman yang berharga untuk kedepannya sekaligus sebagai proses pembelajaran dalam hal demokrasi politik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran akan pentingnya partisipasi politik tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga sebagai proses pendidikan politik yang akan

membentuk budaya demokrasi yang lebih matang di masa depan. Pembelajaran demokrasi ini berlangsung melalui berbagai cara, baik melalui pengalaman langsung terlibat dalam proses politik, mengamati praktik politik yang terjadi di sekitar mereka, maupun melalui sosialisasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.

Hasil observasi menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi saluran penting bagi masyarakat untuk mengakses informasi politik, berdiskusi tentang isu-isu publik, dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah desa. Kelompok masyarakat yang aktif di media sosial, terutama generasi muda, menggunakan platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram untuk menyebarkan informasi tentang program pemerintah desa, mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, dan memobilisasi dukungan untuk isu-isu tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang publik politik tidak lagi terbatas pada forum-forum formal seperti musyawarah desa, tetapi telah meluas ke ruang virtual yang lebih aksesibel dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas. Media sosial juga telah mengubah dinamika akuntabilitas politik, dimana masyarakat dapat dengan mudah menyebarkan informasi tentang kinerja pemerintah desa dan menuntut transparansi, sehingga mendorong pemerintah desa untuk lebih responsif dan akuntabel terhadap masyarakat.

Namun demikian, tingkat kesadaran politik masyarakat masih sangat bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan pengalaman terlibat dalam aktivitas politik. Sebagian masyarakat, terutama yang berpendidikan rendah dan tinggal di wilayah yang aksesnya terbatas, masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang hak-hak politik mereka, mekanisme partisipasi yang tersedia, dan bagaimana cara menyampaikan aspirasi secara efektif. Mereka cenderung pasif dalam proses politik dan lebih mengandalkan tokoh-tokoh yang mereka percayai untuk mewakili kepentingan mereka, tanpa melakukan verifikasi atau kontrol terhadap bagaimana tokoh-tokoh tersebut benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka. Ketimpangan dalam kesadaran politik ini menjadi tantangan dalam upaya penguatan demokrasi partisipatif di desa, karena demokrasi yang berkualitas memerlukan partisipasi yang luas dan merata dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki akses dan kapasitas lebih baik.

Untuk meningkatkan kesadaran politik dan mempercepat pembelajaran demokrasi, diperlukan berbagai upaya sistematis dari berbagai pihak termasuk pemerintah desa, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan di Desa Beringin antara lain penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat, pelatihan untuk kelompok-kelompok masyarakat tentang advokasi dan pengorganisasian, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa melalui publikasi informasi anggaran dan program secara berkala. Upaya-upaya ini menunjukkan hasil yang positif meskipun masih terbatas, dimana sebagian masyarakat mulai lebih aktif mengakses informasi publik, mengajukan pertanyaan kritis dalam musyawarah, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa. Pembelajaran demokrasi merupakan proses yang panjang dan memerlukan kesabaran serta konsistensi dari semua pihak yang terlibat, namun pengalaman di Desa Beringin menunjukkan bahwa transformasi menuju demokrasi yang lebih substansial dan berkualitas adalah mungkin apabila terdapat komitmen dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan untuk terus mendorong partisipasi aktif dan bermakna dari masyarakat dalam kehidupan politik desa.

2. Pembahasan

a. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pemilihan Politik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Beringin dalam proses pemilihan politik cukup tinggi secara kuantitatif, namun masih belum optimal dari sisi kualitas partisipasi. Fenomena ini sejalan dengan konsep demokrasi elektoral yang dikemukakan oleh Huntington (1991) yang membedakan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substansial, dimana keberadaan pemilihan yang bebas dan kompetitif tidak otomatis menjamin kualitas demokrasi yang tinggi apabila tidak disertai dengan partisipasi yang rasional dan berbasis pada pertimbangan programatik. Dalam konteks Desa Beringin, tingginya angka partisipasi dalam pemilihan lebih didorong oleh faktor sosial budaya seperti tekanan sosial, mobilisasi oleh elite lokal, dan harapan akan manfaat material, dibandingkan dengan kesadaran politik yang genuine tentang pentingnya memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Hal ini mengindikasikan bahwa demokrasi di tingkat desa masih berada dalam tahap transisi dari pola-pola politik tradisional menuju demokrasi modern yang lebih rasional dan programatik (Nordholt & van Klinken, 2007).

Praktik politik uang dan mobilisasi berbasis primordial yang masih ditemukan dalam pemilihan di Desa Beringin mencerminkan fenomena yang lebih luas tentang klientelisme dalam demokrasi Indonesia, sebagaimana dianalisis oleh Aspinall dan Berenschot (2019) dalam studi mereka tentang "Democracy for Sale". Menurut mereka, hubungan patron-klien yang mengakar dalam masyarakat Indonesia telah bertransformasi dalam era demokrasi, dimana politisi dan broker politik menggunakan distribusi material untuk memobilisasi dukungan pemilih, sementara pemilih memandang pemilihan sebagai kesempatan untuk mendapatkan manfaat langsung dari kandidat. Pola relasi transaksional ini mengancam konsolidasi demokrasi karena menggeser fokus dari akuntabilitas programatik menuju pertukaran material jangka pendek yang tidak mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan (Mietzner, 2013). Dalam konteks Desa Beringin, praktik semacam ini direproduksi dari pemilihan ke pemilihan karena baik kandidat maupun pemilih telah menginternalisasi logika transaksional tersebut sebagai bagian normal dari proses politik, dan belum ada mekanisme efektif untuk memutus siklus ini.

Namun demikian, munculnya sikap kritis di kalangan sebagian masyarakat, terutama generasi muda dan kelompok terdidik, menunjukkan adanya proses pembelajaran politik yang sejalan dengan teori sosialisasi politik dari Almond dan Verba (1963) yang menekankan bahwa budaya politik masyarakat terbentuk melalui proses pembelajaran yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, pendidikan, media, dan pengalaman langsung berpartisipasi dalam politik. Paparan terhadap informasi politik melalui media massa dan media sosial, serta pengalaman mengamati kinerja pemimpin terpilih, telah membentuk kesadaran kritis di kalangan sebagian masyarakat yang tidak lagi mudah termobilisasi oleh politik uang atau retorika kosong (Lim, 2013). Perkembangan ini memberikan harapan bahwa demokrasi elektoral di Desa Beringin akan secara bertahap mengalami peningkatan kualitas seiring dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, meskipun transformasi ini memerlukan dukungan dari berbagai intervensi seperti pendidikan pemilih, penguatan pengawasan pemilu, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemilihan.

b. Keterlibatan Masyarakat dalam Musyawarah dan Perencanaan Pembangunan Desa

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan forum-forum perencanaan pembangunan yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam implementasi demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Menurut Gaventa dan Barrett (2012) dalam analisis mereka tentang "So What Difference Does it Make?", efektivitas mekanisme partisipasi sangat bergantung pada sejauh mana ruang partisipasi tersebut benar-benar memberdayakan masyarakat untuk mempengaruhi keputusan, bukan sekadar ritual

prosedural yang tidak membawa dampak substantif. Dalam konteks Desa Beringin, meskipun ruang partisipasi telah disediakan melalui musyawarah desa sebagaimana diamanatkan oleh regulasi, namun dominasi elite lokal dalam proses pengambilan keputusan dan lemahnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif menyebabkan musyawarah tidak berfungsi optimal sebagai arena demokrasi deliberatif. Fenomena ini sejalan dengan kritik Hickey dan Mohan (2004) terhadap pendekatan partisipasi yang bersifat instrumentalis dan teknokratis, dimana partisipasi seringkali hanya dijadikan sebagai alat legitimasi bagi keputusan yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemegang kekuasaan, tanpa benar-benar membuka ruang bagi kontestasi dan negosiasi kepentingan yang demokratis.

Dominasi elite lokal dalam forum musyawarah desa dapat dijelaskan melalui konsep modal sosial dan modal budaya dari Bourdieu (1986), dimana individu atau kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, jaringan sosial, pengetahuan, dan kemampuan berbicara memiliki posisi yang lebih kuat dalam arena politik dan mampu mendominasi proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Desa Beringin, tokoh masyarakat, kepala dusun, dan perwakilan kelompok tertentu yang memiliki modal sosial dan budaya lebih tinggi cenderung lebih aktif dan dominan dalam musyawarah, sementara masyarakat biasa yang tidak memiliki modal tersebut cenderung pasif dan termarginalkan. Situasi ini menghasilkan apa yang disebut oleh Cornwall dan Coelho (2007) sebagai "invited spaces" yang bersifat terbatas dan tidak sepenuhnya inklusif, dimana partisipasi hanya terbuka bagi mereka yang memiliki akses dan kapasitas, sementara kelompok marginal seperti perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas mengalami eksklusi baik secara struktural maupun kultural. Untuk mengatasi problem ini, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas kelompok-kelompok marginal agar mereka memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi, serta transformasi dalam tata kelola musyawarah agar lebih inklusif dan responsif terhadap suara-suara yang selama ini termarginalkan.

Peran kelompok-kelompok masyarakat terorganisir seperti kelompok tani, kelompok perempuan, dan karang taruna dalam mengadvokasi kepentingan anggota mereka menunjukkan pentingnya pengorganisasian masyarakat sipil dalam memperkuat demokrasi partisipatif, sebagaimana ditekankan oleh Fung dan Wright (2003) dalam konsep mereka tentang "empowered participatory governance". Kelompok-kelompok terorganisir ini berfungsi sebagai "counter-power" yang menyeimbangkan dominasi elite dan membuka ruang bagi kepentingan yang lebih beragam untuk disuarakan dalam arena publik. Dalam konteks Desa Beringin, kelompok-kelompok ini telah menunjukkan kemampuan untuk memobilisasi anggota, mengidentifikasi kebutuhan secara kolektif, dan menyampaikan aspirasi secara lebih terorganisir dalam musyawarah, sehingga usulan mereka memiliki peluang lebih besar untuk diakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa. Pengalaman ini sejalan dengan temuan Antlov, Wetterberg dan Dharmawan (2016) dalam studi mereka tentang partisipasi warga dalam pemerintahan desa di Indonesia, yang menemukan bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir memiliki kapasitas lebih baik untuk mempengaruhi kebijakan dibandingkan dengan individu-individu yang berpartisipasi secara sporadis. Oleh karena itu, penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil di tingkat desa menjadi strategi penting untuk memperdalam demokrasi partisipatif dan memastikan bahwa berbagai kepentingan dalam masyarakat dapat terartikulasikan dan terakomodasi dalam kebijakan publik.

c. Kesadaran Politik dan Pembelajaran Demokrasi di Kalangan Masyarakat

Variasi dalam kesadaran politik masyarakat Desa Beringin mencerminkan kompleksitas proses pembentukan budaya politik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Menurut teori budaya politik dari Almond dan Verba (1963), terdapat tiga tipe orientasi politik masyarakat yaitu parochial (sempit), subject (kaula), dan participant

(partisipan), dimana dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi demokrasi biasanya ketiga tipe orientasi ini bercampur dan hidup berdampingan. Dalam konteks Desa Beringin, sebagian masyarakat telah menunjukkan orientasi partisipan dengan terlibat aktif dalam proses politik dan memiliki kesadaran tentang hak dan kewajiban politik mereka, namun sebagian lainnya masih memiliki orientasi subject atau bahkan parochial yang ditandai dengan pasivitas politik dan ketergantungan pada tokoh-tokoh tertentu. Perbedaan orientasi politik ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan pengalaman terlibat dalam aktivitas politik, sebagaimana juga ditemukan oleh Norris (2002) dalam studinya tentang budaya politik demokratis di berbagai negara.

Peran media sosial dalam membentuk kesadaran politik dan membuka ruang partisipasi alternatif menunjukkan transformasi dalam lanskap politik lokal yang sejalan dengan konsep "networked public sphere" dari Castells (2012), dimana teknologi komunikasi digital telah menciptakan ruang publik baru yang lebih horizontal dan partisipatif dibandingkan dengan media massa konvensional yang bersifat top-down. Dalam konteks Desa Beringin, media sosial telah memfasilitasi arus informasi yang lebih bebas tentang isu-isu politik lokal, memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka tanpa dibatasi oleh hierarki sosial tradisional, dan memperkuat mekanisme akuntabilitas sosial melalui pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah desa. Fenomena ini sejalan dengan temuan Lim (2013) dalam studinya tentang peran media sosial dalam politik Indonesia, yang menunjukkan bahwa platform digital telah menjadi arena penting bagi mobilisasi politik, diskursus publik, dan kontestasi kekuasaan, meskipun dengan berbagai keterbatasan seperti echo chamber effect dan penyebaran misinformasi yang juga perlu diwaspadai.

Pembelajaran demokrasi yang berlangsung di Desa Beringin mencerminkan proses yang Törnquist (2013) sebut sebagai "learning democracy by doing democracy", dimana masyarakat belajar tentang demokrasi tidak hanya melalui sosialisasi formal tetapi lebih penting lagi melalui pengalaman langsung terlibat dalam praktik politik dan mengalami konsekuensi dari pilihan-pilihan politik yang mereka buat. Pengalaman mengamati bagaimana pemimpin terpilih menjalankan janji kampanye, melihat bagaimana program pembangunan yang mereka usulkan diimplementasikan atau diabaikan, dan merasakan dampak dari kebijakan pemerintah desa terhadap kehidupan mereka sehari-hari, semuanya menjadi pelajaran berharga yang membentuk pemahaman mereka tentang demokrasi dan mempengaruhi perilaku politik mereka di masa depan. Proses pembelajaran ini bersifat kumulatif dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menghasilkan transformasi budaya politik yang fundamental, namun pengalaman di berbagai negara yang mengalami transisi demokrasi menunjukkan bahwa dengan dukungan dari pendidikan politik yang sistematis, penguatan institusi demokratis, dan konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi, transformasi menuju demokrasi yang lebih matang dan berkualitas adalah mungkin dicapai (Diamond, 1999). Dalam konteks Desa Beringin, investasi dalam pendidikan politik, penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta pemberdayaan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci untuk mempercepat pembelajaran demokrasi dan meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat.

D. Kesimpulan

Penelitian tentang peran masyarakat Desa Beringin dalam demokrasi politik menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat telah berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari keterlibatan dalam pemilihan politik, musyawarah desa, perencanaan pembangunan, hingga pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, meskipun dengan tingkat intensitas dan kualitas yang bervariasi. Partisipasi dalam pemilihan politik menunjukkan angka yang cukup tinggi,

namun masih diwarnai oleh praktik politik uang, mobilisasi berbasis primordial, dan pertimbangan transaksional yang menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di desa masih belum sepenuhnya substantif. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dan perencanaan pembangunan masih belum optimal, dimana forum-forum partisipasi yang tersedia cenderung didominasi oleh elite lokal dan belum sepenuhnya inklusif terhadap berbagai kelompok dalam masyarakat, terutama kelompok marginal seperti perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas. Kesadaran politik masyarakat menunjukkan perkembangan positif, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok terdidik yang mulai lebih kritis dan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengakses informasi, mengekspresikan pendapat, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa.

Meskipun demikian, tantangan dalam mewujudkan demokrasi partisipatif yang berkualitas masih cukup besar, termasuk ketimpangan dalam kapasitas dan akses masyarakat untuk berpartisipasi, dominasi elite lokal dalam proses pengambilan keputusan, lemahnya mekanisme akuntabilitas, dan masih kuatnya pola-pola politik tradisional yang berbasis pada patronase dan hubungan primordial. Pembelajaran demokrasi sedang berlangsung di Desa Beringin melalui akumulasi pengalaman berdemokrasi, paparan terhadap informasi politik, dan interaksi dengan berbagai agen sosialisasi politik, namun transformasi menuju budaya politik yang lebih matang dan rasional memerlukan waktu yang panjang dan dukungan sistematis dari berbagai pihak. Untuk memperkuat peran masyarakat dalam demokrasi politik di tingkat desa, diperlukan berbagai upaya strategis termasuk pendidikan politik yang berkelanjutan, penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pemilihan, dan transformasi dalam tata kelola musyawarah agar lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Antlov, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214.
- Antlov, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183.
- Aspinall, E. (2014). Parliament and Patronage. *Journal of Democracy*, 25(4), 96-110.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Berenschot, W. (2018). The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12), 1563-1593.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). New York: Greenwood.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press.
- Cornwall, A., & Coelho, V. S. (2007). *Spaces for Change? The Politics of Citizen Participation in New Democratic Arenas*. London: Zed Books.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (4th

- ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. London: Verso.
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2012). Mapping the Outcomes of Citizen Engagement. *World Development*, 40(12), 2399-2410.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hickey, S., & Mohan, G. (2004). *Participation: From Tyranny to Transformation?* London: Zed Books.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Li, T. M. (2007). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham: Duke University Press.
- Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(4), 636-657.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Nordholt, H. S., & van Klinken, G. (2007). *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Norris, P. (2002). *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Sutoro, E. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Törnquist, O. (2013). *Assessing Dynamics of Democratisation: Transformative Politics, New Institutions, and the Case of Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan.